



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 490 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 175 TAHUN
2022 TENTANG PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Peta Jalan Inflasi Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 175 Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan terdapat perubahan target pertahunnya dan program yang disesuaikan, maka Keputusan Bupati Nomor 175 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Inflasi Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2024, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sumedang Nomor 175 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 126);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

2. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 175 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2024;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 175 TAHUN 2022 TENTANG PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022-2024.

KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Sumedang Nomor 175 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2024, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 November 2023

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 490 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
SUMEDANG NOMOR 175 TAHUN 2022
TENTANG PETA JALAN PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2022-2024

PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022-2024

STRATEGI 4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	TIMELINE TARGET			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	
Keterjangkauan Harga	Stabilisasi Harga	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Data fluktuasi stok, pasokan, dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Dokumen/ Laporan	4	10	12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Pengumpulan data harga komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Jumlah komoditas yang dipantau	Komoditas	69	40	40	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	Lapangan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	Laporan	-	-	12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM)	Kegiatan Operasi Pasar Murah	Laporan	4	12	12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Pelaksanaan Gelar Pangan Murah (GPM)	Kegiatan Gelar Pangan Murah	Laporan	2	30	4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Mengelola Permintaan	Pelaksanaan Diversifikasi Konsumsi Pangan yang Bergizi, Beragam, Berimbang dan Aman	Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan	Skor	93,7	94,2	94,5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

STRATEGI 4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	TIMELINE TARGET			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	
Ketersediaan Pasokan	Memperkuat Produksi	Pemeliharaan jaringan irigasi tersier pertanian	Jumlah jaringan irigasi tersier pertanian yang terpelihara	Unit	284	300	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	-	-	23	a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Peningkatan Produksi Pangan	Peningkatan produksi padi	Ton	457,401	461.650	469,833	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Peningkatan produksi jagung		62,922	126.323	85,192	
			Peningkatan produksi bawang merah		752	767	747	
			Peningkatan produksi aneka cabai		8,509	8,678	8,379	
		Peningkatan Produksi Sapi dan Ayam	Populasi Sapi Potong	Ekor	32.427	34.048	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
			Populasi Ayam Ras Pedaging		2.558.300	2.686.215	-	
		Peningkatan Produksi Hewan Ternak	Peningkatan produksi domba	Ekor	-	-	661	Dinas Perikanan dan Peternakan
			Peningkatan produksi sapi potong		-	-	26	
			Peningkatan Produksi Sapi Potong (Hasil Inseminasi Buatan)		-	-	10.914	
			Peningkatan produksi kambing		-	-	81	
			Peningkatan Produksi Ayam Kampung		-	-	10.960	
		Gerakan Teras Hejo	Persentase rumah yang memanfaatkan lahan pekarangan komoditas hortikultura	Persen	50	60	45	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Regulasi Cadangan Pangan Daerah	Tersedianya Regulasi Cadangan Pangan Daerah	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Beras)	Ketersediaan stok beras CPPD	Ton	10	15	20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat	Kelompok	-	-	8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

STRATEGI 4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	TIMELINE TARGET			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	
Ketersediaan Pasokan	Penguatan Kelembagaan	Pembentukan Klaster Petani Hortikultura	Terbentuknya Klaster Hortikultura	Klaster	-	-	1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kelancaran Distribusi Komunikasi Efektif	Mendorong Kerja Sama Antar Daerah (KAD)	Kerja Sama Antar Daerah	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Daerah	Dokumen	0	1	2	a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan b. Dinas Perikanan dan Peternakan c. Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah
	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	Digitalisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Aplikasi yang menyediakan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Aplikasi	BAPOKTING	SINDANG	Integrasi SINDANG dengan SIPERKASA dan SIMDATER	a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan c. Dinas Perikanan dan Peternakan d. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik e. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
		Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	Unit/lokasi	Pembangunan Kios Pasar Inpres	Rehab 7 Pasar Kabupaten	Rehab 4 Pasar Kabupaten	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Pengawasan dan pengendalian sarana prasarana serta kelancaran lalu lintas	Laporan pengawasan dan pengendalian	Laporan	12	24	48	Dinas Perhubungan
		Penerapan ATCS (<i>Area Traffic Control System</i>) untuk pengguna ruang publik dan sarana prasarana lalu lintas	Laporan penerapan ATCS (<i>Area Traffic Control System</i>)	Laporan	0	24	48	a. Dinas Perhubungan b. Satuan Polisi Pamong Praja c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan d. Kepolisian
		Digitalisasi UMKM Pangan Sisi Hilir/ Fasilitasi <i>e-Commerce</i>	Digitalisasi UMKM Pangan Sisi Hilir/ Fasilitasi <i>e-Commerce</i>	Pelaku Usaha	-	35	425	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

STRATEGI 4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	TIMELINE TARGET			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	
Komunikasi Efektif	Memperbaiki Kualitas Data	Penguatan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Ketepatan waktu input data	Persen	100	100	100	a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian b. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik c. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
	Koordinasi Pusat dan Daerah	Penyusunan laporan kegiatan pengendalian inflasi secara triwulanan	Laporan Triwulan	Laporan	4	4	4	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
		Pembinaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Pelaksanaan Rapat Pembinaan Program Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Laporan	0	2	2	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
		Koordinasi dan komunikasi dengan lembaga / instansi terkait mengenai perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting atau isu strategis lainnya	Pelaksanaan <i>High Level Meeting</i> dan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Laporan	6	6	10	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
		Koordinasi dengan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten / Kota lain terkait pengendalian inflasi daerah	Kegiatan koordinasi dengan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota lain terkait pengendalian inflasi daerah	Laporan	2	3	4	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
		Pemanfaatan infografis dan audio visual untuk sosialisasi pengendalian inflasi kepada masyarakat	Jumlah infografis dan audio visual tentang Pengendalian Inflasi Daerah	Infografis/ video	8 Infografis	30 Infografis	30 Infografis / Audio Visual	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lilis Komala', is positioned above the printed name.

Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002